

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *Deliberative Governance* dalam Pembangunan Daerah (Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Ciamis) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Masalah terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, dikarenakan Musrenbang hanya dianggap sebagai formalitas semata. Rendahnya partisipasi dan Musrenbang yang dianggap sebagai sebuah formalitas disebabkan oleh adanya kekecewaan dari masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Ciamis. Dimana ini bermula dari usulan-usulan masyarakat yang sudah diajukan pada saat Musrenbang yang ternyata banyak yang tidak diakomodir.
2. Pelaksanaan Musrenbang sebagai salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara deliberatif. Dibuktikan dengan dilaksanakannya Musrenbang memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan musyawarah dan mencapai mufakat untuk perencanaan pembangunan daerah ke depannya. Musrenbang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip demokrasi yaitu “Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

3. Pelaksanaan Musrenbang sangat berperan dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Ciamis. Sehingga, Pembangunan ke depannya bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Dimana dengan adanya musrenbang pemerintah dapat menjangring aspirasi masyarakat yang berupa kebutuhan dan keinginan masyarakat baik di tingkat bawah yaitu dari desa/kelurahan sampai dengan Kabupaten. Musrenbang ini lah yang dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD.
4. Dalam pelaksanaan Musrenbang banyak hal dilakukan secara berjenjang. Seperti penjangingan aspirasi atau usulan dari masyarakat yang dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari masyarakat ke desa (Musrenbang Desa), desa ke kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan kecamatan ke kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Selain itu, sosialisasi Musrenbang juga dilakukan secara berjenjang. Dimana sosialisasi dilakukan oleh Bappeda ke kecamatan, kecamatan akan melakukan sosialisasi ke pihak desa, barulah desa yang memberikan sosialisasi kepada Masyarakat secara langsung. Tapi sosialisasi yang dilaksanakan secara berjenjang ini dirasa kurang efektif karena informasi yang disampaikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari kurangnya pemahaman Masyarakat Ciamis terkait Musrenbang.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk menunjang perbaikan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ciamis di Tingkat Kecamatan maka dapat dirumuskan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait Musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Ciamis berdasarkan data hasil penelitian dilaksanakan secara berjenjang yang mengakibatkan informasi tidak diterima secara sempurna oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Masyarakat Kabupaten Ciamis harus mendapatkan sosialisasi mengenai Musrenbang, dan itu menjadi tugas dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Ciamis lebih memahami lagi pelaksanaan Musrenbang yang merupakan salah satu tahapan dalam pembangunan.
2. Usulan-usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat tidak bisa semua terealisasi. Penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran Kabupaten Ciamis sehingga mengharuskan adanya seleksi yang ketat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu untuk lebih menjelaskan lagi kepada masyarakat terkait usulan yang tidak bisa terealisasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui alasan dibalik tidak diterimanya suatu usulan. Jika alasannya berkaitan dengan kondisi keuangan yang terbatas maka sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui dan paham apa alasannya.

3. Karena kondisi keuangan Kabupaten Ciamis yang terbatas maka ini menjadi tugas pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berkaitan dengan Musrenbang, maka lebih baik ke depannya usulan yang akan diakomodir dan direalisasikan adalah usulan yang nantinya akan membantu meningkatkan keuangan daerah. Peningkatan PAD juga harus melibatkan masyarakat salah satunya yaitu dengan mengajak masyarakat untuk membayar pajak, dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Karena apabila pendapatan masyarakat meningkat maka mereka memiliki kemampuan untuk membayar pajak dan nantinya akan membantu meningkatkan PAD Kabupaten Ciamis.

